

**EVALUASI PROGRAM PPA-PKH (PENGURANGAN PEKERJA ANAK –
PROGRAM KELUARGA HARAPAN) TERHADAP PENGURANGAN
ANGKA PUTUS SEKOLAH DI KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2013-2015**

Iin Yuliyanti¹

Abstrak

Alasan yang melatarbelakangi penulis dalam menulis karya tulis ini ialah Pemerintah Kabupaten Bantul khususnya Dinas Tenaga dan Transmigrasi Kabupaten Bantul melaksanakan program PPA-PKH (Pengurangan Pekerja Anak - Program Keluarga Harapan) sejak tahun 2010. Program PPA-PKH merupakan upaya yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul untuk menarik pekerja anak dan dikembalikan kembali ke dunia pendidikan sesuai dengan tingkatannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program PPA-PKH dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat program PPA-PKH dalam mengurangi angka putus sekolah di Kabupaten Bantul tahun 2013-2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian dan analisis menunjukkan bahwa program PPA-PKH yang dilaksanakan di Kabupaten Bantul efektif dan efisien dalam mengurangi angka putus sekolah. Hal tersebut dikarenakan seluruh peserta yang ditarik dari tempat kerjanya dan diikutkan dalam program PPA-PKH ini dikembalikan ke pendidikan sesuai dengan tingkatannya, baik ke pendidikan formal maupun ke pendidikan non formal. Adapun faktor pendukung program PPA-PKH dalam mengurangi angka putus sekolah yaitu peran pendamping, fasilitas yang memadai dan kegiatan yang mendukung. Sedangkan faktor penghambatnya adalah faktor ekonomi, diri anak sendiri, data dan pihak sekolah.

Kata kunci : Evaluasi, Pekerja Anak, Putus Sekolah, Efektif dan Efisien

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting guna menambah ilmu pengetahuan, mengembangkan bakat yang dimiliki serta dapat mengantarkan peserta didik dalam mewujudkan cita-citanya. Namun dalam faktanya di Indonesia banyak anak-anak yang tidak menempuh pendidikan

¹ Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, NIM : 20130520378

atau putus sekolah menjadi pekerja anak dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami oleh orang tuanya. Menurut Kementrian Ketenagakerjaan Indonesia saat ini diperkirakan ada 1,7 juta anak Indonesia atau sekitar 5 persen dari jumlah anak di Indonesia yang berusia 5-14 tahun menjadi pekerja di usia sekolah.²

Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Bantul, dilihat dari indeks pembangunan manusia menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul menduduki peringkat nomor tiga setelah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bantul 8,95 tahun.³ Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bantul tersebut dapat dikatakan rendah, sehingga hal tersebut harus ditindaklanjuti agar rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bantul dapat meningkat. Fakta lain yang terjadi di Kabupaten Bantul dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel Penduduk Angkatan Kerja Kabupaten Bantul Tahun 2013

Golongan Umur	Angkatan Kerja		Jumlah
	Bekerja	Pencari Kerja	
15 – 19	41.356	18.499	58.955
20 – 24	70.022	18.923	88.945
25 - 34	116.183	22.404	138.587
35 keatas	199.168	36.003	235.171
Total	426.729	95.829	522.558

Sumber : Disnakertrans, 2013

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah pekerja yang berusia lima belas sampai sembilan belas tahun berjumlah 41.356 orang, dan pencari kerja sejumlah 18.499 orang. Sehingga total pekerja dan pencari kerja usia lima belas sampai sembilan belas tahun di Kabupaten Bantul berjumlah 58.955 orang. Dengan melihat data tersebut di atas, masalah pekerja anak di Kabupaten Bantul tidak dapat dipandang sebelah mata. Usia-usia tersebut merupakan usia dimana seharusnya mereka menempuh bangku pendidikan tingkat SMP maupun SMA, bukan bekerja ataupun mencari kerja.

² Modul Panduan Umum PPA-PKH Tahun 2015

³ DIY dalam angka 2013, BPS DIY

Dengan permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Bantul sangat antusias dalam melaksanakan program pemerintah pusat yaitu program PPA-PKH (Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan). Dengan adanya program PPA-PKH ini harapannya dapat mengembalikan minat anak untuk menempuh bangku pendidikan lagi. Sehingga, dari pelaksanaan program ini anak-anak yang tadinya putus sekolah atau tidak sekolah akan dikembalikan ke sekolah yang diinginkannya. Dari uraian di atas maka peneliti ingin mengetahui bagaimana evaluasi program PPA-PKH terhadap pengurangan angka putus sekolah yang ada di Kabupaten Bantul tahun 2013-2015 dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat program PPA-PKH dalam mengurangi angka putus sekolah di Kabupaten Bantul tahun 2013-2015.

B. Kajian Teori

Kebijakan publik menurut Carl Fredirch adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai suatu tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.⁴

Sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja. Kebijakan harus diawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut sebagai “evaluasi kebijakan”.⁵ Dalam sebuah evaluasi akan diketahui sejauh mana efektifitas kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya, dan akan diketahui sejauh mana tujuan yang telah dicapai dari kebijakan tersebut.

Menurut Bridgman dan Davis terdapat empat indikator pokok evaluasi kebijakan, yaitu⁶ :

⁴ Suharno, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2013, hal 4

⁵Riant Nugroho, *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi)*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, 2003, hal 183

⁶Bridgman dan Davis, *Australian Policy Handbook*, (diterjemahkan oleh Achmad Fawaid ; Analisa Kebijakan Publik : Konsep, teori dan aplikasinya), Semarang, Universitas Diponegoro, 2000, hal 130

- a. Indikator *input* (masukan) memfokuskan pada penilaian apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Indikator ini dapat meliputi sumber daya manusia, uang, atau infrastruktur pendukung lainnya.
- b. Indikator *process* (proses) memfokuskan pada penilaian bagian sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator ini meliputi aspek efektivitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tertentu.
- c. Indikator *outputs* (hasil) memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Indikator hasil ini misalnya berapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu.
- d. Indikator *outcomes* (dampak) memfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan.

Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dijelaskan bahwa “Pekerja anak adalah anak-anak baik laki-laki maupun perempuan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi yang mengganggu atau menghambat proses tumbuh kembang dan membahayakan bagi kesehatan fisik dan mental anak. Dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa yang dikategorikan sebagai anak adalah yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.⁷

Menurut Warsini, yang dikategorikan sebagai pekerja anak apabila memenuhi indikator antara lain⁸ :

- a. Anak bekerja setiap hari
- b. Anak tereksplorasi
- c. Anak bekerja pada waktu yang panjang
- d. Waktu sekolah terganggu/tidak sekolah.

Kata Putus Sekolah berasal dari kata putus dan sekolah. Putus yang berarti tidak berhubungan lagi dan sekolah yang berarti lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Sehingga putus sekolah dapat tidak berhubungan lagi dengan tempat belajar dan mengajar.

⁷ UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

⁸ Warsini, dkk, *Modul Penanganan Pekerja Anak* (Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI), 2005, Hal. 10

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia putus sekolah didefinisikan sebagai belum sampai tamat sekolahnya sudah keluar (dari sekolah).

Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya putus sekolah, diantaranya adalah sebagai berikut⁹ :

- a. Faktor ekonomi, keluarga yang tidak mampu sehingga orang tua murid memutuskan sekolah anaknya karena ketidakmampuan membayar biaya sekolah anaknya. Faktor ini yang menyebabkan tingginya angka putus sekolah.
- b. Faktor budaya, faktor budaya yang masih diterapkan oleh sebagian masyarakat di Indonesia adalah menikahkan anaknya pada usia dini. Untuk tetap melestarikan tradisi yang telah diwariskan oleh turun-menurun tidak sedikit dari masyarakat Indonesia yang menikahkan anak-anaknya pada usia dini, sehingga sebagian anak-anak tersebut terpaksa memutuskan pendidikannya atau bahkan sama sekali belum mengenyam pendidikan.

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu suatu metode penelitian dimana meneliti suatu kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi dalam system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.¹⁰

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.

3. Unit Analisis

⁹ Suryadi, *Profil Dunia Pendidikan di Saat Krisis Ekonomi*, Jurnal Dikbud No.028, Maret 2001, hal 134-144

¹⁰ Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1980, Hal. 64

Unit analisis merupakan satuan tertentu yang yang diperhitungkan sebagai obyek penelitian.¹¹ Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai unit analisisnya adalah ketua pelaksana program PPA-PKH, pendamping program PPA-PKH, serta peserta program PPA-PKH.

4. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung (langsung dari informan) yang memiliki informasi atau data tersebut.¹² Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.

b. Data Sekunder

Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung (langsung dari informan) yang memiliki informasi atau data tersebut.¹³ Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan merupakan metode yang mencakup cara yang dipergunakan seseorang untuk mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap-cakap, berhadapan muka dengan orang itu.¹⁴ Teknik wawancara ini dilakukan terhadap responden yang telah ditentukan untuk memperoleh data yang selengkap-lengkapny.

b. Dokumentasi

¹¹ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 1995, hal 29

¹² Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta, Erlangga, 2009, hal 86

¹³ Ibid., hal 86

¹⁴ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat (Edisi ketiga)*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1997, hal 129

Dokumentasi merupakan pengumpulan data melalui dokumen-dokumen atau catatan yang tersedia yang menjadi obyek penelitian, seperti buku, jurnal, media massa dan berbagai sumber lainnya yang bersifat relevan.

6. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik interaktif dari Miles dan Huberman, dalam analisa data terdiri atas tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹⁵ Ketiga komponen tersebut aktivitasnya berbentuk interaktif dengan proses pengumpulan data yang menggunakan proses siklus. Adapun penjelasan dari kriteria tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data, merupakan informasi baik data primer maupun data sekunder.
- b. Reduksi data, merupakan proses seleksi pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data yang ada dalam *field note* (catatan di lapangan).
- c. Penyajian data, merupakan suatu rangkaian argumentasi informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan.
- d. Penarikan kesimpulan, merupakan suatu usaha menarik konklusi dari hal-hal yang ditemui dalam reduksi maupun penyajian data.

PEMBAHASAN

A. Program PPA-PKH di Kabupaten Bantul

Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) adalah kegiatan menarik pekerja anak dari Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang putus sekolah untuk dikembalikan ke pendidikan melalui pendampingan di *shelter*.¹⁶ Adapun tujuan dan manfaat dari pelaksanaan program PPA-PKH adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Pelaksanaan Program PPA-PKH
 - a. Meningkatkan angka partisipasi sekolah pada usia wajib belajar.

¹⁵ Manthaw B Miles & A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1992, hal 16

¹⁶ Pedoman Pendampingan PPA-PKH Tahun 2014, hal 5

- b. Mengembalikan anak ke dunia pendidikan, baik yang tidak sekolah maupun yang putus sekolah.
 - c. Mengurangi jumlah pekerja anak.
2. Manfaat Pelaksanaan Program PPA-PKH
- a. Anak mempunyai motivasi untuk kembali ke dunia pendidikan.
 - b. Anak mampu bersosialisasi dan berinteraksi dengan teman dan lingkungan sekitar dengan baik.
 - c. Anak mempunyai rasa percaya diri untuk mewujudkan cita-citanya.

Program PPA-PKH dilaksanakan selama empat bulan berturut-turut dan mulai pelaksanaannya dua bulan sebelum ada pendaftaran pendidikan formal (SD, SMP, SMA dan SMK). Pada bulan pertama dilakukan perekrutan peserta, pada bulan kedua dilakukan karantina (*shelter*) selama satu bulan, pada bulan ketiga anak dikembalikan kembali ke dunia pendidikan dan pada bulan ke empat dilakukan pendampingan kepada peserta yang telah kembali ke dunia pendidikan.

B. Evaluasi Program PPA-PKH terhadap Pengurangan Angka Putus Sekolah di Kabupaten Bantul Tahun 2013-2015

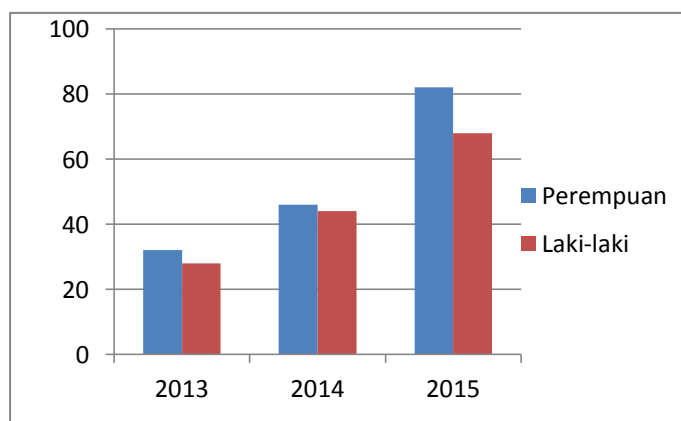
Sumber daya manusia yang melaksanakan program PPA-PKH adalah dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten/kota yang ada di seluruh Indonesia. Dalam pelaksanaan program PPA-PKH di Kabupaten Bantul dilaksanakan secara langsung oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul. Dalam pelaksanaannya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dibantu oleh beberapa pendamping. Seluruh dana yang digunakan dalam pelaksanaan program PPA-PKH berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN). Dana yang berasal dari APBN tersebut digunakan untuk membiayai seluruh fasilitas dan kegiatan dalam pelaksanaan program PPA-PKH.

Fasilitas yang diberikan kepada peserta saat mengikuti program PPA-PKH antara lain adalah tempat tidur, MCK, makan tiga kali sehari, minum, alat tulis, sepatu, tas, pakaian olahraga, alat MCK dan uang saku bulanan.

Dengan adanya fasilitas yang memadai dan lengkap diharapkan peserta lebih antusias dalam mengikuti program tersebut. Fasilitas yang diberikan di *shelter* dapat mencukupi kebutuhan hidup selama satu bulan dan dapat mendukung untuk melanjutkan pendidikan selanjutnya.

Program PPA-PKH yang dilaksanakan di Kabupaten Bantul tahun 2013-2015 efektif dan efisien dalam mengurangi angka putus sekolah di Kabupaten Bantul. Dengan di kembalikannya peserta ke dunia pendidikan maka akan mengurangi angka putus sekolah yang ada di Kabupaten Bantul. Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan dan fasilitas bermanfaat untuk tindak lanjut peserta kembali ke pendidikannya. Namun untuk pemerataan sasaran dapat dikatakan tidak merata. Hal tersebut dikarenakan Setiap kecamatan memiliki pekerja anak yang putus sekolah yang berbeda-beda jumlahnya, bahkan ada kecamatan yang tidak ada sama sekali. Hambatan yang terjadi di sini adalah tidak adanya data pekerja anak yang putus sekolah dari setiap kecamatan, sehingga pendamping harus terjun langsung ke lapangan.

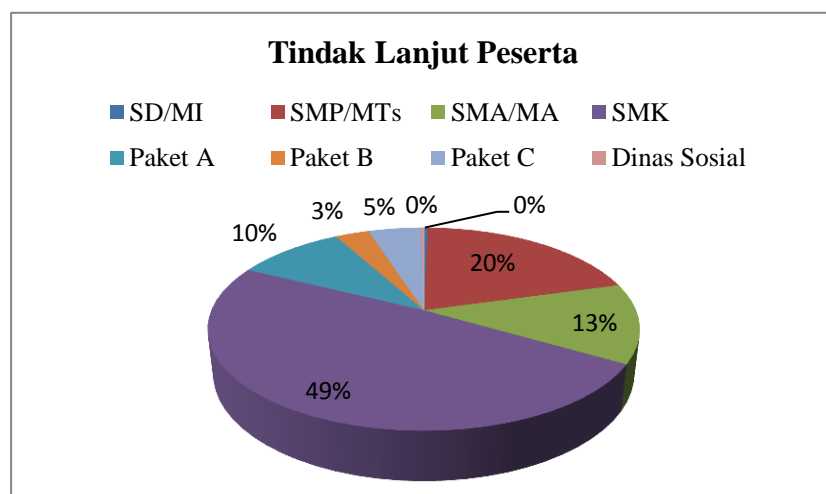
Jumlah Peserta Program PPA-PKH



Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa jumlah peserta program PPA-PKH dari tahun 2013 hingga tahun 2015 selalu mengalami peningkatan. Selain itu, jumlah peserta perempuan setiap tahunnya lebih banyak dibandingkan dengan peserta laki-laki. Pada tahun 2013 jumlah peserta hanya 60 orang, tahun 2014 meningkat menjadi 90 orang dan pada tahun 2015

jumlah peserta 150 orang. Peserta setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan karena perekrutan peserta tidak dilakukan secara merata dalam setiap kecamatan. Adapun tindak lanjut peserta program PPA-PKH tahun 2013-2015 dapat dilihat pada diagram berikut :

Tindak Lanjut Peserta PPA-PKH di Kabupaten Bantul Tahun 2013-2015



Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa tindak lanjut peserta program PPA-PKH di Kabupaten Bantul tahun 2013-2015 paling banyak adalah melanjutkan ke tingkat SMK yang mencapai 49%. Urutan kedua setelah SMK yaitu SMP/MTs sebanyak 20%, dilanjutkan oleh SMA/MA sebanyak 13%. Urutan ke empat yaitu Paket A sebanyak 10%, Paket C sebanyak 5% dan paket B sebanyak 3%. Dan yang paling sedikit adalah SD/MI dan Dinas Sosial yang hanya 0%.

Dampak positif yang diterima oleh peserta setelah mengikuti program PPA-PKH di Kabupaten Bantul khususnya setelah kegiatan di *shelter* yaitu peserta dapat bersosialisasi baik dengan teman dan lingkungan sekitarnya, peserta mempunyai semangat yang lebih untuk kembali menempuh pendidikan dan peserta lebih rajin dalam menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Dalam pelaksanaan program ini tidak ada

dampak negatif yang diterima oleh peserta karena seluruh rangkaian kegiatan berdampak positif.

Program PPA-PKH sangat baik dalam meminimalisir pekerja anak atau anak yang bekerja dan putus sekolah di Kabupaten Bantul. Selain itu pelaksanaan program PPA-PKH dapat mengembalikan anak ke dunia pendidikan. Harapan kedepannya program PPA-PKH tetap dilanjutkan karena masih banyak pekerja anak yang belum terjamah dan belum mendapatkan pelayanan pendidikan.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Program PPA-PKH dalam Mengurangi Angka Putus Sekolah di Kabupaten Bantul Tahun 2013-2015

Faktor pendukung dalam pelaksanaan program PPA-PKH dalam mengurangi angka putus sekolah di Kabupaten Bantul tahun 2013-2015 adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan yang dilaksanakan selama pelaksanaan program PPA-PKH

Kegiatan yang dilaksanakan selama pelaksanaan program PPA-PKH berkomitmen dalam mengurangi pekerja anak. Seluruh rangkaian program menjadi pendukung terhadap anak untuk melanjutkan pendidikannya.

2. Fasilitas yang diberikan kepada peserta

Seluruh fasilitas yang diberikan kepada peserta program PPA-PKH berguna untuk mendukung peserta dalam melanjutkan pendidikan selanjutnya.

3. Peran pendamping

Pendamping yang berkompeten sangat berpengaruh dalam pelaksanaan program PPA-PKH terhadap pengurangan angka putus sekolah di Kabupaten Bantul. Hal itu dikarenakan pendamping menjadi aktor utama dalam memotivasi peserta untuk kembali ke dunia pendidikan. Pendamping berusaha mencari sekolah dan lembaga pendidikan yang tepat untuk peserta. Selain itu, pendamping juga berusaha mencari sekolah yang bebas biaya agar anak dapat melanjutkan pendidikan tanpa kendala masalah ekonomi.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan program PPA-PKH dalam mengurangi angka putus sekolah di Kabupaten Bantul tahun 2013-2015 adalah sebagai berikut :

1. Ekonomi orang tua

Ekonomi orang tua yang rendah membuat anak lebih memilih untuk kembali bekerja daripada kembali ke dunia pendidikan.

2. Peserta

Peserta lebih memilih kembali ke dunia kerja karena sudah merasa malas untuk memikirkan pelajaran. Hal itu terjadi karena peserta sudah pernah mendapatkan penghasilan.

3. Data yang kurang valid

Data yang kurang valid juga menjadi penghambat program PPA-PKH dalam mengurangi angka putus sekolah di Kabupaten Bantul. Dengan demikian pendamping perlu mencari peserta lagi yang sesuai dengan kriteria untuk diikutkan program tersebut.

4. Pihak sekolah

Terdapat beberapa sekolah yang masih memberatkan biaya pendidikan untuk siswanya, khususnya pada SMA dan SMK.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai evaluasi program PPA-PKH di Kabupaten Bantul tahun 2013-2015 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Program PPA-PKH yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul efektif dan efisien dalam mengurangi angka putus sekolah yang ada di Kabupaten Bantul. Seluruh pekerja anak atau anak yang bekerja dan putus sekolah ditarik dari tempat kerjanya untuk diikutkan *shelter* selama satu bulan, kemudian dikembalikan ke dunia pendidikan sesuai tingkatannya.

2. Peserta program PPA-PKH diberikan pendampingan baik pada saat *shelter* maupun *pasca shelter*. Pada saat *shelter* peserta diberikan motivasi agar mempunyai semangat lagi untuk kembali ke dunia pendidikan. Fasilitas dan kegiatan yang mendukung kegiatan selanjutnya juga diberikan pada saat pelaksanaan *shelter*. Pada saat *pasca shelter* peserta didaftarkan ke lembaga pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Pendamping tetap melakukan pendampingan agar anak tidak kembali ke dunia kerja.
3. Faktor yang menjadi pendukung program PPA-PKH dalam mengurangi angka putus sekolah adalah kegiatan selama pelaksanaan program dan fasilitas yang diberikan selalu bernilai positif untuk peserta program PPA-PKH dan bermanfaat untuk kelanjutan pendidikannya. Selain itu, peran pendamping juga sangat mendukung dalam pelaksanaan program PPA-PKH ini.
4. Faktor yang menjadi penghambat program PPA-PKH dalam mengurangi angka putus sekolah adalah faktor ekonomi orang tua yang rendah membuat anak ingin kembali ke dunia kerja, faktor diri anak sendiri yang sudah tidak mempunyai niat untuk belajar karena sudah memperoleh penghasilan, data yang kurang valid dan dari pihak sekolah yang masih memberatkan biaya pendidikan khususnya SMA dan SMK.

B. Saran

Dari kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya setiap kecamatan memiliki data yang valid tentang pekerja anak dan anak putus sekolah yang ada di wilayahnya, sehingga dapat mempermudah dalam perekrutan peserta program PPA-PKH.
2. Sebaiknya pihak sekolah turut mendukung peserta setelah mengikuti program tersebut dengan tidak memberatkan biaya pendidikan khususnya untuk yang kembali melanjutkan pendidikan tingkat SMA ataupun SMK.

Daftar Pustaka :

Buku :

- Bridgman dan Davis, 2000, *Australian Policy Handbook*, (diterjemahkan oleh Achmad Fawaid ; Analisa Kebijakan Publik : Konsep, teori dan aplikasinya), Semarang, Universitas Diponegoro
- Irawan Soehartono, 1995, *Metode Penelitian Sosial* , Bandung , PT. Remaja Rosdakarya
- Koentjaraningrat, 1997, *Metode-metode Penelitian Masyarakat (Edisi ketiga)*, Jakarta ,Gramedia Pustaka Utama
- Manthaw B Miles & A. Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta, Universitas Indonesia Press
- Muhammad Idrus, 2009, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta, Erlangga
- Muhammad Nasir, 1980, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Riant Nugroho, 2003, *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi)*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo
- Suharno, 2013, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Penerbit Ombak

Sumber lain :

- DIY dalam angka 2013, BPS DIY
- Modul Panduan Umum PPA-PKH Tahun 2015
- Pedoman Pendampingan PPA-PKH Tahun 2014
- Suryadi, *Profil Dunia Pendidikan di Saat Krisis Ekonomi*, Jurnal Dikbud No.028, Maret 2001, hal 134-144
- UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Warsini, dkk, 2005, *Modul Penanganan Pekerja Anak* (Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI)